

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PELAKU PENANGKAPAN IKAN BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI NOMOR 2/PERMEN-  
KP/2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN  
ALAT PENANGKAPAN IKAN  
DI DESA KUALA ENOK**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Devi Paulina**

**150710044**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PELAKU PENANGKAPAN IKAN BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI NOMOR 2/PERMEN-  
KP/2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN  
ALAT PENANGKAPAN IKAN  
DI DESA KUALA ENOK**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana



Oleh :  
**Devi Paulina**  
**150710044**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 10 Maret 2020  
Yang membuat pernyataan,

**Devi Paulina**  
**NPM 150710044**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PELAKU PENANGKAPAN IKAN BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI NOMOR 2/PERMEN-  
KP/2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN  
ALAT PENANGKAPAN IKAN  
DI DESA KUALA ENOK**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh :**

**Devi Paulina  
150710044**

**Telah disetujui Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 10 Maret 2020**

**Padrisan Jamba, S.H, M.H  
Pembimbing**

## **ABSTRAK**

Penggunaan alat tangkap pukat Tarik dapat merusak lingkungan laut atau sumber daya laut karena penangkapan ikan dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan dan menyebabkan konflik antara nelayan tradisional dan nelayan. Pada tahun 2015 Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Peraturan (Permen KP) No.2 tahun 2015. alat tangkap ikan yang dilarang dalam peraturan tersebut ialah pukat tarik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 terhadap teori efektivitas tentang Larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Tarik di Desa Kuala Enok dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Tarik di Desa Kuala Enok. Metode yang digunakan yaitu meninjau langsung kelapangan atau jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan meninjau langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kecamatan Kuala Enok. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan Peraturan Menteri Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan di lapangan masih belum optimal, di karenakan masih ada beberapa daerah yang masih belum menerapkan peraturan tersebut, salah satu nya di Desa Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indra Giri Hilir. Berdasarkan dari hasil peninjauan di lapangan dengan para narasumber dari didapatkan bahwa pelaksanaan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNo.2/PERMEN-KP/2015 masih belum di tegakkan di Desa Kuala Enok dikarenakan masih banyak faktor-faktor yang memberatkan para nelayan untuk menerapkan peraturan tersebut,

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pukat Tarik, Lampara Dasar.

## ***ABSTRACT***

*The use of trawl fishing gear can damage the marine environment or marine resources because fishing is done without regard to environmental aspects and cause conflicts between traditional fishermen and machine fishermen. In 2015 the Minister of Maritime Affairs and Fisheries issued Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation (Permen KP) No. 2 of 2015. One of the fishing gear that is prohibited in the regulation is trawling. This study aims to find out how the implementation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No.2 / PERMEN-KP / 2015 on the theory of effectiveness regarding the Prohibition of using Trawler fishing gear in Kuala Enok Village and inhibiting factors of law enforcement against the Minister of Maritime Affairs and Fisheries No.2 / PERMEN-KP / 2015 concerning a ban on the use of Tukat Tarik fishing gear in the village of Kuala Enok. The method used is to directly examine the scope or type of this research is an empirical legal research by directly observing the Department of Marine and Fisheries of Indragiri Hilir Regency and the All-Indonesian Fishermen Association of Kuala Enok District. The results of the study found that the application of Ministerial Regulation Number 2 / Permen-Kp / 2015 Regarding the Prohibition of the Use of Fishing Equipment in the field was still not optimal, because there were still some areas that had not yet implemented the regulation, one of them was in Kuala Enok Village, Tanah District Merah Indra Giri Hilir Regency. Based on the results of field observations with the speakers, it was found that the implementation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 2 / PERMEN-KP / 2015 has not been established in Kuala Enok Village because there are still many factors that burden fishermen to implement the regulation,*

*Keywords:* Law Enforcement, Trawler, Basic Lampara.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Penulis panjatkan atas berkat dan rahmat serta karuniaNya, sehingga Penulis bisa menuntaskan Karya Ilmiah atau Skripsi ini yang merupakan syarat dalam menuntaskan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis sadar bahwa pada proses penulisan ini banyak menghadapi kendala. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kebaikan dalam penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang dengan rasa senang hati. Namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak, Penulis dapat tetap menyelesaikan tugas ini dengan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, dan selaku pembimbing akademik Penulis;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah memberikan banyak masukan dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan Skripsi;
4. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn., Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., Bapak Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H., Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn., Ibu

Lenny Husna, S.H., M.H., Bapak Effendi Sekedang S.H., M.H., Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.H., dan bapak Zulkifli, S.H., M.H., selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah memberikan ilmunya dan banyak membantu selama Penulis kuliah;

5. Dosen dan staf Universitas Putera Batam;
6. Teman-teman satu angkatan kuliah penulis yaitu Andi Nur'Afni, Dede Tamara, Ario Anggara, Dwiki Firsal, Bobby, dan teman-teman satu Angkatan kuliah Penulis yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
7. semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam membantu Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini ataupun yang menemani penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.

Orang tua Penulis, saudara-saudara penulis beserta keluarga penulis yang sangat Penulis sayangi dan yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada Penulis di setiap waktu.

Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 10 Maret 2020

Devi Paulina

## DAFTAR ISI

### **HALAMAN SAMPUL DEPAN**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	iii
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii

### **BAB I PENDAHULUAN.....**

1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Pembatasan Masalah .....	5
1.4. Perumusan Masalah.....	6
1.5. Tujuan Penelitian .....	6
1.6. Manfaat Penelitian .....	6

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....**

2.1. Kerangka Teoritis.....	8
2.1.1. Penegakan Hukum .....	8
2.1.2. Teori Efektivitas Hukum.....	11
2.1.3. Pelaku tindak pidana.....	15
2.1.4. Penangkapan Ikan .....	16
2.1.5 Alat penangkapan ikan .....	17
2.2. Kerangka Yuridis .....	21
2.2.1. Penegakan Hukum .....	22
2.2.2. Pelaku Tindak Pidana.....	22
2.2.3. Penangkapan Ikan .....	23
2.2.4. Alat Penangkapan Ikan .....	23
2.3. Kerangka Pemikiran .....	24
2.4. Penelitian Terdahulu.....	25

### **BAB III METODE PENELITIAN .....**

3.1. Penelitian Empiris.....	37
------------------------------	----

3.2. Metode Pengumpulan Data .....	38
3.2.1. Jenis Data .....	39
3.2.2. Alat Pengumpulan Data .....	40
3.2.3. Lokasi Penelitian.....	41
3.3. Metode Analisis Data .....	41
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	 42
4.1. Hasil Penelitian .....	42
4.1.1. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 Terhadap Teori Efektivitas Hukum dan Teori Penegakan Hukum Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Tarik di Desa Kuala Enok.....	42
4.1.2. Faktor- Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Tarik Di Desa Kuala Enok .....	45
4.2. Pembahasan .....	47
4.2.1. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 Terhadap Teori Efektivitas Hukum dan Teori Penegakan Hukum Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Tarik di Desa Kuala Enok.....	47
4.2.2. Faktor- Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Tarik Di Desa Kuala Enok .....	52
 <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	 66
1.1. Simpulan .....	66
1.2. Saran .....	67
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 699
<b>LAMPIRAN .....</b>	73